

Implementation of the Simpeldesa App as a Publishing Tool in Tambak Kalisogo Village

[Implementasi Aplikasi Simpeldesa Sebagai Sarana Publikasi di Desa Tambak Kalisogo]

Rizky Sinta Nuriyah¹⁾, Lailul Mursyidah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study examines the deployment of the Simpeldesa application as a digital publication platform in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. The primary constraints consist of insufficient digital literacy among village officials and inhabitants, a scarcity of active village journalists, minimal community engagement in using official village platforms, and constrained managerial competence in application administration. This study seeks to evaluate the efficacy of Simpeldesa implementation through the lens of the policy implementation theory articulated by George C. Edwards III, which highlights four critical factors: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. A qualitative research methodology was utilised, with data gathered via interviews, observations, and documentation, and analysed employing the interactive model proposed by Miles and Huberman. The results demonstrate that Simpeldesa has favourably impacted transparency and the distribution of village information. Communication and coordination among implementers were notably excellent, bolstered by a receptive disposition from village administrators. Nonetheless, restrictions in human resource capability and the lack of formal regulations persist as substantial impediments. Consequently, bolstering digital literacy, augmenting the capabilities of village officials, and instituting formal regulatory frameworks are imperative for facilitating sustainable village e-government deployment.*

Keywords – Simpeldesa; e-government; digital publication; policy implementation; digital village

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji penerapan aplikasi Simpeldesa sebagai media publikasi berbasis digital di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan pokok yang muncul mencakup rendahnya literasi digital baik pada aparatur maupun masyarakat, kurangnya jurnalis desa yang berperan aktif, minimnya keterlibatan warga dalam mengakses platform resmi desa, serta terbatasnya kapasitas sumber daya yang mengelola aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Simpeldesa dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menyoroti empat aspek utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Simpeldesa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi serta penyebaran informasi desa. Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana berlangsung cukup efektif, serta didukung oleh sikap pelaksana yang tanggap. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum tersedianya regulasi formal masih menjadi hambatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas aparatur desa, serta penyusunan regulasi sebagai landasan kelembagaan guna menunjang implementasi e-government desa yang berkelanjutan.*

Kata Kunci – Simpeldesa; e-government; publikasi digital; implementasi kebijakan; desa digital

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik tidak semata-mata dimaknai selaku pemberian layanan administratif saja, melainkan juga meliputi cara pemerintah menghadirkan akses informasi kepada publik yang bersifat terbuka, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak masyarakat yang telah dimuat pada UU RI No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi penegasan bahwasanya masing-masing setiap individu mempunyai hak memperoleh informasi terkait kebijakan publik, jalannya pembangunan, sampai pengelolaan anggaran negara, termasuk pada level pemerintahan desa [1]. Di samping itu, tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik juga dipertegas melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta upaya peningkatan mutu layanan bagi masyarakat [2].

Akan tetapi, kondisi nyata di lapangan memperlihatkan bahwa proses penyampaian informasi di wilayah desa masih menemui berbagai hambatan. Sebagian besar desa masih bertumpu pada penggunaan media tradisional seperti papan pengumuman maupun pertemuan langsung yang memiliki jangkauan terbatas. Di samping itu, informasi publik kerap tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga potensi desa, hasil pembangunan, serta aktivitas masyarakat tidak banyak terekspos ke publik. Situasi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat transparansi serta minimnya keterlibatan aktif khalayak pada proses pembangunan desa. Guna menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan E-Government selaku upaya modernisasi dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), E-Government diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [3]. Implementasi SPBE juga selaras terhadap konsep Good Governance yang menitikberatkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi, serta akuntabilitas kepada publik [4]. Di sisi lain, pelaksanaan dalam tingkatan desa turut dikuatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Desa, yang mengelola tanggung jawab pemerintah desa ketika mengatur informasi serta komunikasi dengan cara terbuka guna menunjang keikutsertaan khalayak pada pembangunan.

Bagian dari wujud penerapan e-government pada tingkat desa diwujudkan lewat penggunaan aplikasi Simpeldesa (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa). Aplikasi tersebut berbasis cloud computing serta mampu diperoleh aksesnya lewat perangkat web ataupun smartphone, serta dilakukan perancangan guna mendukung digitalisasi, meningkatkan keikutsertaan khalayak, serta memperkuat kemandirian desa [5]. Simpeldesa (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa) merupakan sebuah platform digital yang dimanfaatkan sebagai sarana pendukung implementasi e-government di lingkungan desa. Aplikasi ini tidak berada di bawah kepemilikan kementerian tertentu, melainkan merupakan produk layanan digitalisasi desa yang dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia melalui program Smart Village Nusantara, kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah hingga ke level desa. Walaupun demikian, penerapan Simpeldesa tetap mengacu dan sejalan dengan kebijakan nasional seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta prinsip transparansi dan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam regulasi perundang-undangan. Simpeldesa mempunyai tiga pilar utama, yakni Smart Society, Smart Economy, dan Smart Governance. Pilar Smart Society menitikberatkan terhadap interaksi sosial dengan komunikasi dua arah antara pemerintah desa bersama khalayak, mencakup penyediaan ruang kolaborasi warga. Pilar Smart Economy berperan dalam menunjang penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lewat pengembangan usaha berbasis digital serta keterlibatan khalayak pada pengembangan perekonomian desa. Sementara itu, Smart Governance memberikan sistem pelayanan administrasi, pengelolaan data penduduk, survei desa, pelaporan khalayak, hingga fasilitas publikasi informasi dan berita desa [6].

Fitur Berita Desa berfungsi sebagai media publikasi digital yang memiliki peran strategis. Lewat kanal tersebut, pemerintahan desa mampu mendistribusikan berbagai informasi terkait aktivitas pembangunan, program pemerintah, potensi desa, sampai berbagai inovasi yang dihasilkan oleh khalayak [7]. Selain itu, keberadaan berita desa juga membuka peluang keterlibatan jurnalis desa serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam menyusun serta mempublikasikan berita, tentunya melalui adanya persetujuan dari redaktur desa. Oleh karena itu, aliran informasi yang terbentuk tidak lagi bersifat satu arah, tetapi berkembang menjadi komunikasi yang kolaboratif [8].

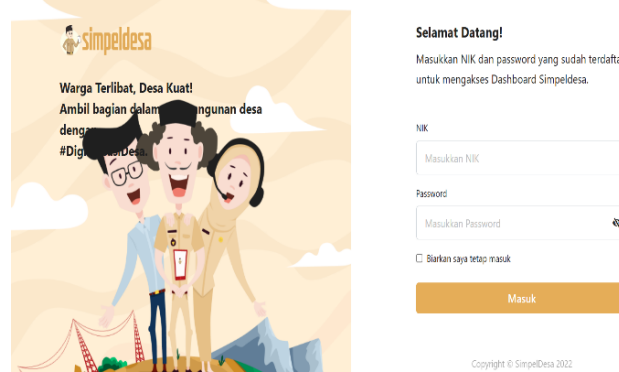
Dalam skala nasional, eksistensi Simpeldesa memiliki peranan yang sangat penting. Sampai saat ini, aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dalam 28 provinsi, 130 kabupaten, 381 kecamatan, serta 822 desa di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwasanya Simpeldesa sudah berkembang menjadi bagian dari sarana digitalisasi desa dengan jangkauan yang cukup luas. Bahkan, dengan jumlah 83.391 desa di Indonesia yang hampir seluruhnya belum mendapatkan sorotan dari media arus utama, Simpeldesa hadir selaku alternatif solusi guna menonjolkan potensi desa sekaligus memperkenalkan identitas lokal ke ranah nasional.

Aplikasi Simpeldesa dengan cara resmi mulai dikenalkan di Kabupaten Sidoarjo ketika tahun 2023, tepatnya di 9 desa, termasuk Desa Tambak Kalisogo yang berada di Kecamatan Jabon. Adanya aplikasi ini berperan sebagai tahapan strategis pada upaya menunjang transformasi digital dalam tingkatan desa, terutama pada bidang publikasi informasi serta komunikasi pemerintahan. Dalam Desa Tambak Kalisogo, penggunaan Simpeldesa difokuskan terhadap pemanfaatan optimal fitur Berita Desa selaku media publikasi resmi. Perihal tersebut menjadi krusial karena desa mempunyai kekuatan sosial ataupun perekonomian yang seharusnya disebar dengan cara luas supaya khalayak mendapatkan akses informasi yang memadai, dan memberikan kesempatan kerja sama bersama pihak eksternal. Dengan adanya Simpeldesa, informasi desa mampu disebarluaskan dengan cara digital, cepat, serta terdokumentasi dengan baik, alhasil sanggup menambahkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan desa. Namun demikian, akses terhadap aplikasi ini bersifat terbatas dan hanya ditujukan bagi masyarakat desa yang telah terdaftar dalam sistem. Hal ini disebabkan karena penggunaan Simpeldesa hanya dapat dilakukan pada desa-desa yang telah melakukan aktivasi serta terintegrasi secara resmi di dalam sistem aplikasi. Khalayak mampu melakukan pengunduhan dan memasang aplikasi Simpeldesa lewat Play Store dalam perangkat Android masing-masing, kemudian melakukan proses registrasi agar dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia. Proses akses tersebut dilakukan melalui mekanisme verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), di mana data pengguna akan

dicocokkan dengan database kependudukan desa. Dengan demikian, sistem yang digunakan tidak mengandalkan pendekatan radius geografis berbasis lokasi (GPS), melainkan menggunakan pendekatan administratif yang berbasis data penduduk. Hanya warga yang telah terdaftar secara resmi dalam database desa yang diperkenankan untuk mengakses fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Simpeldesa. Pembatasan ini diterapkan dengan tujuan menjaga keamanan data, memastikan ketepatan sasaran layanan publik, serta membatasi akses hanya kepada masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah administratif desa.

Berikut merupakan penggambaran tampilan aplikasi Simpeldesa yang dipakai oleh pemerintah Desa Tambak Kalisogo:

Gambar 1. Aplikasi Simpeldesa Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo 2025

Selain mempunyai tiga pilar utama yakni Smart Society, Smart Economy, dan Smart Governance, aplikasi Simpeldesa juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pelayanan publik dan pengelolaan informasi desa secara digital. Fitur tersebut mencakup publikasi berita desa sebagai media penyebaran informasi resmi, layanan administrasi desa berbasis online untuk mempermudah pengurusan dokumen, serta pengelolaan data kependudukan yang terintegrasi. Selain itu, Simpeldesa menyediakan fitur laporan dan pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung, serta fitur survei desa untuk menjangkau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dalam mendukung aspek ekonomi, terdapat pula fitur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Seluruh fitur tersebut juga didukung dengan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat secara real-time. Keberadaan fitur-fitur ini menunjukkan bahwa Simpeldesa tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai sistem terpadu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berbasis digital.

Meskipun begitu, penerapan publikasi digital melalui Simpeldesa tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Sejumlah hambatan yang ditemui di lapangan di antaranya mencakup keterbatasan kemampuan literasi digital baik pada aparat maupun masyarakat desa, kurangnya jurnalis desa yang berpartisipasi aktif, serta kurangnya tingkat kesadaran warga guna memanfaatkan platform resmi milik desa yang berperan sebagai persoalan utama. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan media digital dikarenakan hanya tersedia satu operator desa, alhasil proses pengelolaan aplikasi belum berlangsung secara maksimal serta turut memengaruhi tingkat penggunaannya di kalangan khalayak.

Di bawah ini merupakan data perkembangan jumlah pengguna aplikasi Simpeldesa semenjak pertama kali diluncurkan sampai saat ini:

Tabel 1. Data perkembangan pengguna aplikasi Simpeldesa Ds. Tambak Kalisogo

Tahun	Jumlah Pengguna
2023	0
2024	25
2025	93
Total	118

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Berdasarkan data pada tabel mengenai perkembangan jumlah pengguna aplikasi Simpeldesa, dapat diketahui bahwasanya proses adopsi aplikasi tersebut berlangsung dengan cara bertingkat semenjak pertama kali diluncurkan.

Ketika tahun 2023 belum ada pengguna yang dicatat sama sekali sebab kegiatan sosialisasi baru mulai dijalankan pada periode tersebut, sehingga pemanfaatan aplikasi belum berjalan. Memasuki tahun 2024, jumlah pengguna tercatat sebanyak 25 akun, yang sebagian besar berasal dari aparatur desa serta lembaga desa sebagai tahap awal penerapan sistem. Jumlah ini mencerminkan adanya keseriusan pemerintah desa dalam mulai memanfaatkan Simpeldesa sebagai media publikasi resmi. Kemudian, pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang cukup besar dengan penambahan sebanyak 93 pengguna yang berasal dari khalayak desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya Simpeldesa mulai dikenal, diterima, serta digunakan oleh warga, alhasil peran aplikasi tidak lagi memiliki keterbatasan dalam pada kepentingan administratif internal desa saja, melainkan telah meluas hingga mencakup kebutuhan publik dengan cara lebih luas.

Dengan cara menyeluruh sampai tahun 2025, total pengguna aplikasi tersebut meraih 118 individu. Apabila dilakukan perbandingan terhadap total keseluruhan masyarakat di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo yang berjumlah 2.605 jiwa, tingkat penggunaan aplikasi masih ditemukan di sekitar angka 4,5%. Walaupun persentase tersebut masih tergolong rendah, kecenderungan peningkatan dari tahun 2024 menuju 2025 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Perihal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peluang yang cukup besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya, terutama jika kegiatan sosialisasi serta edukasi digital terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III memberi kerangka konseptual yang menyeluruh. Edwards memberi penjelasan bahwasanya penerapan kebijakan publik ialah tahap pelaksanaan keputusan pemerintah oleh aparat birokrasi guna mewujudkan tujuan aturan yang sudah ditetapkan, yang mana tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh interaksi beragam aspek yang sama-sama berkaitan [9]. Tahapan tersebut mencakup berbagai pengupayaan terstruktur guna mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata, baik pada skala besar ataupun kecil, dengan tetap memperhatikan dinamika organisasi serta kondisi lingkungan eksternal. Lebih lanjut, Edwards mengemukakan empat aspek utama yang menjadi penentu kesuksesan penerapan kebijakan, yakni: 1) komunikasi di antara para pelaksana kebijakan, 2) ketersediaan sumber daya seperthalnya tenaga manusia, pendanaan, serta fasilitas, 3) disposisi atau sikap pelaksana yang meliputi komitmen serta motivasi birokrasi, dan 4) struktur organisasi birokrasi yang mencakup hierarki, prosedur kerja, serta koordinasi internal, sepertihalnya juga dijelaskan oleh Lexy J. Moleong. Melalui pertimbangan keempat faktor tersebut, mampu dilakukan pemahaman serta analisis mengenai seberapa jauh sebuah aturan publik mampu diterapkan dengan cara efektif dan meraih sasaran yang telah ditetapkan [10].

Riset sebelumnya yang dilaksanakan Apriliani, Salbiah, dan Kartini berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Aplikasi Simpeldesa di Desa Cijayanti” [11]. Riset ini memakai pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Artikel ini memiliki fokus terhadap analisis implementasi aplikasi Simpeldesa sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpeldesa mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan transparansi informasi desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan literasi digital aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pelatihan teknis bagi pengelola aplikasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Azima, Zamzami, dan Arif dengan judul “Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Mensosialisasikan Aplikasi Simpeldesa (Studi Kasus Nagari Lubuak Batingkok)” [12]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada aspek komunikasi dalam implementasi Simpeldesa sebagai media interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hasil riset memperlihatkan bahwasanya komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya intensitas sosialisasi serta rendahnya literasi digital masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat penggunaan aplikasi.

Adapun penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Mustika Rani yang berjudul “Building Smart Villages melalui Simpeldesa: Menuju Dynamic Governance di Sidoarjo” [13]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap implementasi Simpeldesa dalam mendukung konsep desa cerdas (smart village). Artikel ini berfokus pada peran Simpeldesa dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa berbasis digital melalui tiga pilar utama, yaitu Smart Society, Smart Economy, dan Smart Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpeldesa memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, serta pengembangan ekonomi desa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan pengelolaan sistem digital.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas implementasi aplikasi Simpeldesa dalam konteks digitalisasi desa, namun umumnya masih berfokus pada aspek tertentu seperti pelayanan administrasi, komunikasi, dan pengembangan konsep smart village. Misalnya, penelitian Apriliani, Salbiah, dan Kartini menyoroti faktor pendukung dan penghambat implementasi Simpeldesa, sementara penelitian Azima dkk. lebih menekankan pada aspek komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Adapun penelitian Mustika Rani berfokus pada peran Simpeldesa dalam mendukung konsep smart village. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menganalisis implementasi Simpeldesa menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan.

Kebaruan dalam penelitian ini berada pada penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagai landasan untuk mengkaji pemanfaatan aplikasi Simpeldesa pada Pemerintah Desa Tambak Kalisogo. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek fungsional aplikasi sebagai sarana pelayanan, komunikasi, maupun pengembangan desa digital, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada keterkaitan antar faktor utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi di antara para aktor kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana (termasuk tingkat literasi digital aparat), dan struktur organisasi yang mampu mendorong keikutsertaan khalayak selaku aspek yang menentukan kesuksesan publikasi digital. Oleh karena itu, riset ini tidak sekadar memaparkan keadaan empiris di lapangan, namun juga memberi kontribusi konseptual guna mengembangkan wawasan terkait tantangan implementasi publikasi digital berbasis e-government dalam tingkat desa, terutama lewat perspektif interaksi antara faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

Berlandaskan atas penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Desa Tambak Kalisogo masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam pelaksanaan publikasi digital melalui aplikasi Simpeldesa. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan kemampuan literasi digital baik pada aparat maupun khalayak, kurangnya tingkat partisipasi warga dalam menggunakan platform resmi desa, dan kurangnya jurnalis desa yang aktif menghasilkan tulisan berita. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya penggunaan fitur Berita Desa sebagai media penyebaran informasi terkait pembangunan, potensi lokal, ataupun inovasi khalayak. Oleh sebab itu, periset hendak melakukan analisis serta pemaparan lebih mendalam mengenai implementasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menggarisbawahi empat elemen utama penentu kesuksesan, yaitu komunikasi antar pelaku kebijakan, ketersediaan sumber daya (meliputi SDM, pendanaan, dan fasilitas pendukung), disposisi penyelenggara (yang mencakup sikap, komitmen, serta motivasi aparatur birokrasi), dan struktur organisasi birokratis (mencakup sistem hierarki, prosedur kerja, serta koordinasi internal).

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Seperti yang diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln [14], penelitian kualitatif dilaksanakan dalam kondisi alami dengan tujuan untuk memahami sekaligus menafsirkan fenomena yang berlangsung. Pendekatan ini dipilih agar peneliti mampu mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam terkait penerapan aplikasi Simpeldesa dalam publikasi digital di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajian diarahkan pada penggunaan fitur Berita Desa sebagai media publikasi resmi pemerintah desa. Penetapan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan tiga orang informan, yang terdiri dari perangkat desa yang menjabat sebagai kasi pelayanan, operator aplikasi Simpeldesa, serta perwakilan masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada tingkat keterlibatan langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan aplikasi Simpeldesa, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang relevan, komprehensif, dan representatif terkait proses implementasi serta dampak yang dihasilkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman [15] yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan, observasi dilakukan untuk melihat secara nyata praktik pemanfaatan aplikasi di lapangan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji arsip serta laporan yang berkaitan dengan Simpeldesa. Proses analisis dilakukan secara simultan selama pengumpulan data berlangsung guna menemukan pola, tema, serta keterkaitan yang relevan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh disederhanakan dan dikelompokkan agar mampu memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai implementasi publikasi digital berbasis e-government di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan menjembatani antara sasaran kebijakan terhadap perwujudannya melalui hasil aktivitas pemerintahan [16]. Hal ini sejalan dengan pemikiran George C. Edwards III yang menyatakan bahwasanya penerapan kebijakan adalah tahapan menjalankan keputusan pemerintah oleh aparatur birokrasi guna mewujudkan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan, dimana tingkat keberhasilan sangat ditentukan oleh hubungan antar faktor seperti komunikasi di antara para aktor, kecukupan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan susunan birokrasi yang mempermudah sasaran tersebut tercapai melalui kegiatan lembaga pemerintah yang mengikutsertakan sejumlah pemangku kepentingan.

A. Komunikasi

Berdasarkan pemikiran George C. Edwards III pada kerangka teorinya mengenai implementasi kebijakan publik, aspek komunikasi di antara para aktor kebijakan menjadi komponen yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan tahap pelaksanaan. Komunikasi yang berjalan secara efektif mencakup penyampaian informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, serta berlangsung dua arah antara perumus kebijakan, pelaksana (misalnya birokrasi desa), dan pihak penerima manfaat (masyarakat), sehingga mampu mengurangi potensi kesalahpahaman sekaligus menjamin koordinasi yang lebih optimal [17]. Dalam konteks penerapan aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, aspek ini berperan sebagai faktor pokok pada kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi publik, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Akan tetapi, berlandaskan atas temuan wawancara bersama para informan, komunikasi masih menemui sejumlah kendala, walaupun berbagai pengupayaan sudah dilaksanakan guna memperkuat efektivitasnya.

Pelaksanaan sosialisasi aplikasi Simpeldesa kepada perangkat desa serta khalayak memperlihatkan ditemukannya langkah yang cukup terencana, namun intensitas pelaksanaannya masih tergolong memiliki keterbatasan. Ibu Isna, selaku perangkat desa yang memiliki tanggung jawab dalam koordinasi program desa, memberi penjelasan bahwasanya kegiatan penyuluhan sudah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2023 dengan sasaran lembaga desa serta khalayak, serta kembali dilakukan dua kali pada tahun 2024 dengan fokus pada BUMDes dan UMKM. “Kami melaksanakan sosialisasi secara bertahap agar seluruh pihak dapat memahami manfaat Simpeldesa, mulai dari proses instalasi hingga pemanfaatannya dalam layanan administrasi desa. Hal ini cukup membantu dalam mengurangi resistensi awal dari masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi,” ujar Ibu Isna (wawancara, 18 Juli 2025). Pendekatan tersebut sejalan dengan teori Edwards, di mana komunikasi awal yang dilakukan secara intensif mampu menunjang kesadaran serta komitmen para pelaku, walaupun Ibu Isna juga menekankan bahwasanya efektivitas sosialisasi akan semakin meningkat apabila mengikutserakan tokoh khalayak guna mengembangkan jangkauan penyampaian informasi.

Di bawah ini merupakan frekuensi pelaksanaan sosialisasi aplikasi Simpeldesa dalam rentang waktu 2023–2025:

Tabel 2. Frekuensi Sosialisasi Aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Sasaran Sosialisasi	Jumlah Kegiatan	Keterangan
2023	Lembaga Desa & Masyarakat Umum	2	Penyuluhan awal, pengenalan instalasi & penggunaan dasar
2024	BUMDes & UMKM	2	Fokus pada pemanfaatan Simpeldesa untuk administrasi usaha
2024	Perangkat Desa & RT/RW	1	Pelatihan teknis integrasi Simpeldesa ke rutinitas kerja
Total	-	5	-

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Walaupun demikian, masih ditemukan hambatan dalam proses penyampaian informasi maupun publikasi melalui platform Simpeldesa, khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses digital masyarakat desa. Bapak Irawan selaku operator Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo mengungkapkan adanya kendala teknis serta keterbatasan literasi digital. “Terkadang, penyampaian informasi seperti jadwal kegiatan desa atau APBDes melalui aplikasi tidak serta-merta diterima oleh seluruh warga, sebab tidak semua memiliki perangkat smartphone ataupun jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, kami masih kerap memanfaatkan papan pengumuman konvensional sebagai media pendukung,” ungkap Bapak Irawan (wawancara, 18 Juli 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan pandangan Edwards bahwasanya distribusi komunikasi yang tidak merata mampu menjadi penghambat implementasi kebijakan, yang mana ketergantungan penuh terhadap media digital berpotensi mengesampingkan kelompok rentan, alhasil dibutuhkan pendekatan hybrid agar arus informasi dapat tersampaikan dengan cara optimal kepada seluruh pihak.

Tingkat khalayak terkait informasi yang disampaikan lewat Simpeldesa turut berperan sebagai tolok ukur efektivitas komunikasi. Ibu Rosa, selaku salah satu perwakilan warga yang aktif menggunakan aplikasi serta ikut serta pada aktivitas desa, menyampaikan bahwasanya informasi terkait aktivitas desa, termasuk APBDes, agenda rutin, hingga jadwal pelayanan, sudah disediakan dengan cara menyeluruh. “Sebagai pengguna, saya menilai informasi dalam Simpeldesa sudah cukup lengkap dan mudah diakses setelah saya mengikuti pelatihan dari RT setempat. Contohnya, saya dapat melihat jadwal kegiatan posyandu tanpa perlu datang langsung ke kantor desa, yang tentu sangat membantu bagi ibu rumah tangga seperti saya,” tutur Ibu Rosa (wawancara, 18 Juli 2025). Pernyataan Ibu Rosa tersebut menegaskan peran khalayak selaku penerima sekaligus pemberi umpan balik, yang sejalan atas konsep komunikasi dua arah dalam teori Edwards. Walaupun demikian, ia juga menegaskan bahwasanya masih terdapat

warga, khususnya kalangan lanjut usia, yang belum mengetahui keberadaan fitur tersebut, sehingga diperlukan upaya sosialisasi lanjutan guna meningkatkan pemahaman secara merata.

Di samping itu, tersedianya panduan penggunaan serta pelatihan menjadi faktor pendukung dalam memperkuat efektivitas komunikasi. Bapak Irawan menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan telah dilakukan secara berkala dan disosialisasikan, biasanya melalui perwakilan tokoh masyarakat maupun pengurus RT/RW. “Kami menyediakan panduan terkait instalasi dan proses login aplikasi, lalu meminta pihak RT untuk meneruskannya kepada warga masing-masing. Metode ini membuat proses pembelajaran terasa lebih personal dan efisien, walaupun tantangannya terletak pada menjaga konsistensi partisipasi masyarakat,” jelas Bapak Irawan (wawancara, 18 Juli 2024). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Isna yang menegaskan bahwasanya pelatihan ini membantu aparat desa guna melakukan integrasi penggunaan Simpeldesa ke dalam aktivitas kerja sehari-hari. Sementara itu, menurut pandangan Ibu Rosa, pelatihan tersebut turut mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi, misalnya melalui penyampaian masukan dengan memanfaatkan fitur umpan balik yang tersedia dalam aplikasi.

Selain kegiatan sosialisasi serta penyebaran informasi, aspek komunikasi pada penerapan Simpeldesa juga direalisasikan dengan mekanisme publikasi berita desa. Proses publikasi ini mempunyai sifat terbuka namun tetap terkontrol, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan berita, meskipun tidak dapat dipublikasikan secara langsung tanpa proses seleksi. Setiap informasi yang diajukan, baik oleh masyarakat maupun pihak pemerintah desa, wajib melalui tahap verifikasi oleh administrator. Tahap ini bertujuan guna melakukan penyaringan konten yang tidak tepat, seperti halnya isu SARA, konflik, ataupun materi yang mengandung unsur pornografi, sebelum akhirnya dipublikasikan di portal Simpeldesa. Alhasil, sistem komunikasi yang berjalan tetap mampu mengakomodasi partisipasi publik dan mempertahankan mutu serta kredibilitas informasi yang disampaikan.

Di bawah ini merupakan contoh data tahapan atau alur publikasi berita pada aplikasi Simpeldesa:

Tabel 3. Tahapan Alur Publikasi Berita Desa

Tahap	Proses	Pelaku	Keterangan
1.	Pengajuan berita	Masyarakat/ Pemerintah Desa	Khalayak ataupun perangkat desa menyusun draft berita guna dilakukan publikasi
2.	Upload ke sistem Simpeldesa	Pengguna (masyarakat/perangkat desa)	Draft berita dilakukan pengiriman menggunakan fitur publikasi di aplikasi
3.	Review awal (pengecekan kelengkapan format dan isi)	Admin/operator desa	Admin memeriksa apakah berita sesuai format, bahasa, dan etika publikasi
4.	Filter konten sensitif (SARA, konflik, pornografi, hoaks, dll.)	Admin/operator desa	Berita yang memuat persoalan negatif akan diberikan penolakan serta dikembalikan supaya direvisi
5.	Persetujuan publikasi	Admin/operator desa	Berita yang lolos filter diberikan status “Tayang”.
6.	Publikasi di portal Simpeldesa	Sistem aplikasi	Berita tayang dengan cara resmi serta mampu didapatkan aksesnya oleh publik
7.	Umpan balik masyarakat	Masyarakat pembaca	Khalayak mampu membaca, memberi komentar, atau menyampaikan aduan.

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Secara menyeluruh, aspek komunikasi dalam pelaksanaan aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dapat dikatakan cukup menunjang keberhasilan, sebagaimana dijelaskan dalam teori George C. Edwards III bahwa komunikasi yang efektif harus disampaikan secara jelas, konsisten, serta berlangsung dua arah. Kondisi ini tampak dari adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang tersusun secara sistematis serta adanya dukungan fitur komunikasi di dalam aplikasi tersebut. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah kendala seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, terbatasnya intensitas pelaksanaan sosialisasi, serta belum meratanya distribusi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Azima dkk. yang menegaskan bahwa intensitas komunikasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan komunikasi dua arah sekaligus optimalisasi pemanfaatan umpan balik dari masyarakat sebagai strategi untuk memaksimalkan implementasi Simpeldesa pada masa yang akan datang.

B. Sumber Daya

Berdasarkan teori penerapan kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, ketersediaan sumber daya menjadi bagian dari empat elemen kunci yang menetapkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya tersebut meliputi aspek manusia, keuangan, serta infrastruktur yang dibutuhkan guna mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks penerapan aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, faktor sumber daya ini memiliki peranan penting dalam menunjang operasional aplikasi yang dirancang untuk menyediakan layanan administrasi desa secara digital, seperti pengelolaan data penduduk dan penyebaran informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, yaitu perangkat desa (Ibu Isna), operator aplikasi Simpeldesa (Bapak Irawan), serta perwakilan khalayak sebagai pengguna aplikasi (Ibu Rosa), secara umum ketersediaan sumber daya dilihat cukup memadai, walaupun masih ditemukan sejumlah keterbatasan yang berdampak pada tingkat efisiensi. Penjabaran tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yakni SDM, pendanaan, serta sarana dan prasarana (sarpras).

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM mengacu terhadap kapasitas serta kompetensi para penyelenggara kebijakan, yang meliputi pengetahuan, keahlian, serta dorongan kerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya [18]. Edwards menegaskan bahwa kualitas SDM yang mumpuni mampu mempercepat jalannya implementasi melalui pengurangan kesalahan serta peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan. Di lingkungan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, kapasitas SDM dinilai relatif cukup, khususnya pada tingkat operator aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Irawan selaku operator aplikasi Simpeldesa, diketahui bahwasanya ia sudah memiliki pelatihan yang memadai dalam pengelolaan sistem tersebut. Ia menyampaikan, “saya sebagai operator sudah cukup kompeten dalam mengelola dan memperbaiki aplikasi Simpeldesa. Setiap update fitur baru bisa saya tangani dalam waktu singkat, meskipun awalnya butuh pelatihan tambahan dari dinas terkait” (wawancara, 18 Juli 2025). Di sisi lain, Ibu Isna selaku perangkat desa menegaskan pandangan manajerial, dengan memberi pernyataan, “SDM di desa kami sudah siap, tapi kami masih membutuhkan refresher training secara berkala agar bisa mengikuti perkembangan teknologi” (wawancara, 18 Juli 2025). Berlandaskan perspektif khalayak, Ibu Rosa selaku perwakilan pengguna aplikasi ikut andil pada wawancara dengan menegaskan, “Saya merasa pelayanan melalui aplikasi ini lancar karena operatornya responsif; mereka selalu menjelaskan cara penggunaan jika ada kendala” (wawancara, 18 Juli 2025). Pada umumnya, SDM telah berperan dalam menunjang implementasi, namun peningkatan melalui pelatihan berkelanjutan tetap dibutuhkan guna optimalisasi peranan yang dijalankan.

Berikut merupakan data tingkat pendidikan perangkat Desa Tambak Kalisogo:

Tabel 4. Tahapan Alur Publikasi Berita Desa

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Sugeng	Kepala Desa	SMA/SMK Sederajat
2.	M. Rofi'i	Sekretaris Desa	SMA/SMK Sederajat
3.	Linda Machmudah, S.AP	Kaur Keuangan	S1
4.	N. Agus Irawan, S.AP	Kaur Perencanaan	S1
5.	Riris Dwi R, S.AP	Kaur Tata Usaha	S1
6.	Katirin, S.Pdi	Kasi Pemereintahan	S1
7.	Isnafiatul Azizah, S.AP	Kasi Pelayanan	S1
8.	M. Syaifuddin Zuhri, S.AP	Kasi Kesra	S1
9.	Edi Slamet	Kasun Bangunrejo	SMA/SMK Sederajat
10.	Fahim Ridho Irawan, S.M	Kasun Kalisogo	S1
11.	Eko Cahyono	Kasun Bangunsari	SMA/SMK Sederajat

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, indikator sumber daya manusia dalam penerapan Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo tergolong cukup mendukung, namun belum optimal. Menurut teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kompetensi dan kesiapan pelaksana. Data jenjang pendidikan menunjukkan sebagian besar perangkat inti telah berpendidikan S1, meskipun masih terdapat perangkat dengan pendidikan SMA/SMK, sehingga kapasitas dasar SDM dapat dikatakan memadai. Hal ini didukung oleh hasil wawancara, di mana operator dinilai kompeten dan responsif, serta perangkat desa telah mampu menjalankan sistem meskipun masih membutuhkan pelatihan lanjutan. Namun, pengelolaan aplikasi yang masih terpusat pada satu operator menunjukkan keterbatasan pemerataan kemampuan digital. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Apriliani dkk. dan Mustika Rani yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan dalam implementasi Simpeldesa. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemerataan kompetensi digital agar implementasi berjalan lebih optimal.

2. Dana

Dana merupakan komponen keuangan yang sangat penting dalam menunjang jalannya operasional kebijakan, mencakup pembiayaan untuk pemeliharaan maupun pengembangan sistem [19]. Edwards menyatakan bahwa keterbatasan anggaran kerap menjadi hambatan utama dikarenakan mampu memberi batasan pada pemanfaatan sumber daya lainnya. Di lingkungan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, pendanaan pada aplikasi Simpeldesa tergolong memiliki keterbatasan, akan tetapi diarahkan terhadap kebutuhan yang bersifat prioritas. Ibu Isna, selaku perangkat desa, memberi penjelasan bahwasanya anggaran disalurkan dengan cara berkala. Beliau memberi pernyataan, “Untuk anggaran khusus operasional Simpeldesa, setiap tahun sekali kami menyediakan biaya maintenance web dan perbaikan sistem, yang cukup untuk menjaga kestabilan aplikasi” (wawancara, 18 Juli 2025). Bapak Irawan menegaskan dari pandangan teknis, “Dana yang ada sudah mencukupi untuk biaya server dan lisensi, tapi jika ada peningkatan pengguna, kami mungkin butuh tambahan untuk skalabilitas” (wawancara, 18 Juli 2025). Ibu Rosa, sebagai perwakilan khalayak turut memberi kontribusi pada diskusi dengan menegaskan, “Dari sisi pengguna, saya tidak merasakan dampak kurangnya dana karena layanan tetap gratis dan cepat, tapi saya harap desa terus mendapat dukungan dari pemerintah atas untuk ini” (wawancara, 18 Juli 2025). Walaupun ketersediaan dana terbatas, pengalokasian yang tepat telah mampu menjaga keberlanjutan implementasi, meskipun tetap berpotensi terpengaruh oleh perubahan anggaran desa.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek dana dalam implementasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo tergolong cukup memadai meskipun masih terbatas. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edwards III yang menekankan pentingnya sumber daya finansial dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dana yang tersedia telah dialokasikan untuk kebutuhan utama seperti maintenance sistem, server, dan lisensi, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Isna dan Bapak Irawan, meskipun berpotensi kurang jika penggunaan aplikasi meningkat. Dari sisi masyarakat, Ibu Rosa menilai keterbatasan dana tidak berdampak pada kualitas layanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbatasan dana dapat menjadi hambatan dalam pengembangan program. Dengan demikian, dana saat ini cukup mendukung operasional dasar, namun masih perlu penguatan untuk keberlanjutan implementasi.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merujuk pada ketersediaan infrastruktur baik fisik maupun teknologi yang menunjang penyelenggaraan aturan, sepertihalnya perangkat keras serta jaringan konektivitas [20]. Edwards menyatakan bahwa kelengkapan sarpras yang memadai mampu memperlancar proses komunikasi sekaligus koordinasi di antara para pelaksana kebijakan. Di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, fasilitas pendukung bagi implementasi Simpeldesa dipandang sangat optimal, terutama karena ditunjang ketersediaan akses internet yang melimpah. Bapak Irawan sebagai operator aplikasi memberi penegasan kesiapan infrastruktur tersebut melalui penyampaian, “Kami memiliki komputer dan laptop khusus untuk Simpeldesa, plus koneksi internet fiber optic yang stabil, sehingga aplikasi bisa diakses tanpa gangguan signifikan” (wawancara, 18 Juli 2025). Ibu Isna turut memberikan gambaran menyeluruh dengan menyatakan, “Fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan internet sangat mendukung operasional kami; desa sudah dilengkapi hotspot gratis dari program pemerintah” (wawancara, 18 Juli 2025). Dari sudut pandang masyarakat, Ibu Rosa juga menegaskan bahwa, “Sebagai masyarakat, saya bisa akses aplikasi dari rumah berkat sinyal internet yang bagus di desa, ini membuat publikasi informasi publikasi terasa lebih mudah dan cepat, cukup sekali login sudah cukup” (wawancara, 18 Juli 2025). Pada umumnya, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran implementasi, melalui keberadaan internet gratis berperan sebagai kunci dalam meningkatkan aksesibilitas.

Berikut adalah data sarana dan prasarana pendukung aplikasi Simpeldesa:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Pendukung Aplikasi Simpeldesa

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	2 unit	Baik
2.	Laptop	1 unit	Baik
3.	Jaringan Internet (WiFi)	2 jaringan	Stabil
4.	Printer	2 unit	Baik
5.	Server/Hosting Aplikasi	1 sistem	Baik
6.	Smartphone (Operator)	1 unit	Baik
7.	Hotspot Desa (WiFi Publik)	2 titik	Cukup Stabil

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana dalam implementasi aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo tergolong memadai dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Data menunjukkan adanya fasilitas seperti komputer, laptop, jaringan internet stabil, serta

hotspot desa yang menunjang operasional aplikasi. Hasil wawancara dengan Bapak Irawan dan Ibu Isna juga menguatkan bahwa sarana yang tersedia sudah cukup mendukung, sementara Ibu Rosa sebagai pengguna merasakan kemudahan akses informasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Apriliani, Salbiah, dan Kartini yang menyebutkan bahwa sarana prasarana menjadi faktor pendukung implementasi Simpeldesa, meskipun di beberapa desa masih terbatas. Dengan demikian, sarana dan prasarana di Desa Tambak Kalisogo berperan sebagai faktor pendukung utama dalam mendukung efektivitas implementasi aplikasi Simpeldesa.

Oleh karena itu, unsur sumber daya dalam kerangka teori Edwards pada umumnya memperkuat pelaksanaan aplikasi Simpeldesa di lingkungan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, walaupun peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan dana berkelanjutan masih dibutuhkan guna mengantisipasi kemungkinan kendala pada waktu mendatang. Hasil temuan tersebut selaras dengan perspektif Edwards yang menegaskan bahwa hubungan timbal balik antar komponen sumber daya mampu mendorong peningkatan efektivitas kebijakan dengan cara menyeluruh.

C. Disposisi Sikap

Pada teori implementasi kebijakan berlandaskan atas George C. Edwards III, disposisi pelaksana dipandang sebagai bagian dari elemen utama yang menentukan kesuksesan penyelenggaraan suatu aturan. Disposisi tersebut meliputi sikap, komitmen, motivasi, serta persepsi para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan, yang dapat berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila para pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat serta persepsi yang positif, maka proses implementasi cenderung berjalan secara efektif. Sebaliknya, adanya sikap penolakan atau rendahnya tingkat motivasi dapat memicu penyimpangan dari rencana yang telah dirancang [21]. Pada konteks pemanfaatan aplikasi Simpeldesa di lingkungan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo selaku salah satu penerapan e-government desa, disposisi para penyelenggara dianalisis berlandaskan hasil wawancara bersama tiga informan kunci, yakni perangkat desa, operator aplikasi, serta perwakilan khalayak. Hasil analisis tersebut memperlihatkan adanya keragaman disposisi yang mencerminkan tantangan dalam proses transformasi digital dalam tingkatan desa, yang mana tingginya motivasi seseorang tidak senantiasa diiringi oleh komitmen kolektif yang sejalan.

Ibu Isna, yang merupakan bagian dari perangkat desa yang berperan guna mengelola administrasi desa, memperlihatkan sikap yang positif serta komitmen awal terhadap penerapan Simpeldesa, walaupun terdapat keterbatasan pada konsistensi pelaksanaannya. Ia mengatakan, “Saya sangat setuju dengan penggunaan Simpeldesa sebagai media publikasi desa karena selain mempermudah akses informasi, aplikasi ini juga mempermudah biaya operasional. Dengan satu klik saja, semua masyarakat sudah bisa mengetahui informasi penting seperti kegiatan desa atau pengumuman, sehingga tidak perlu lagi mencetak atau menyebarkan secara manual.” (wawancara, 18 Juli 2025). Pernyataan tersebut merefleksikan adanya pandangan positif dari Ibu Isna yang memandang Simpeldesa selaku inovasi yang efisien, sejalan terhadap disposisi yang menunjang tujuan aturan e-government dalam menambahkan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Akan tetapi, tingkat komitmennya dalam menjalankan penggunaan aplikasi secara rutin masih dipengaruhi melalui aspek eksternal. Ibu Isna menyatakan, “Saya sangat termotivasi untuk menjalankan aplikasi ini secara rutin karena potensinya dalam mempercepat pelayanan desa, tapi kenyataannya tidak bisa dilakukan setiap hari. Sebagai perangkat desa, kami memiliki tugas lapangan yang padat, seperti kunjungan rumah tangga atau koordinasi dengan RT/RW, sehingga update aplikasi sering tertunda.” (wawancara, 18 Juli 2025). Perihal tersebut menunjukkan bahwa bahwasanya walaupun motivasi intrinsik yang dimiliki cukup tinggi, disposisi yang ditunjukkan oleh Ibu Isna tetap diberi pengaruh oleh beban kerja yang padat, sehingga menyebabkan penyelenggaraan yang kurang konsisten dan berpotensi menurunkan keefektifan penerapan dengan cara menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam teori Edwards.

Bapak Irawan, yang berperan selaku operator utama Simpeldesa di desa tersebut, menunjukkan disposisi yang paling antusias di antara para pelaksana inti, terutama dalam hal kompetensi serta motivasi pribadi. Ia mengatakan, “Sebagai operator, saya sangat termotivasi untuk mengelola Simpeldesa karena aplikasi ini mempermudah publikasi informasi desa secara real-time, seperti laporan keuangan atau jadwal musyawarah desa, yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari. Saya setuju sepenuhnya karena biayanya murah dan efisien satu klik sudah cukup untuk menjangkau seluruh warga melalui notifikasi.” (wawancara, 18 Juli 2025). Pandangan positif tersebut mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Bapak Irawan terhadap proses transformasi digital, yang mana beliau memandang aplikasi tersebut selaku sarana yang menunjang perannya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat desa.

Meskipun demikian, Bapak Irawan juga memberi pengakuan adanya sejumlah hambatan yang memberi dampak pada kinerjanya, yang menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tetap rentan terhadap faktor eksternal. Beliau mengatakan “Kendala utama bagi saya sebagai admin adalah keterbatasan waktu, karena mengelola aplikasi terasa repot di tengah tugas-tugas administratif lainnya seperti verifikasi data atau koordinasi dengan kecamatan. Saya termotivasi untuk update rutin, tapi tidak bisa setiap hari; biasanya hanya 3-4 kali seminggu setelah menyelesaikan pekerjaan prioritas.” (wawancara, 18 Juli 2025). Selain itu, Bapak Irawan juga menyoroti rendahnya tingkat antusiasme dari perangkat desa yang lain melalui pernyataan, “Faktanya, banyak perangkat desa yang kurang setuju dengan transformasi digital ini karena menurut mereka Simpeldesa masih kurang optimal. Di desa kami, hanya satu

orang yaitu saya yang benar-benar menangani ini, sementara yang lain lebih nyaman dengan metode konvensional.” (wawancara, 18 Juli 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya fragmentasi disposisi dalam kalangan pelaksana, yang mana motivasi seseorang yang tinggi tidak diimbangi oleh dukungan kolektif, sehingga memiliki potensi menjadi hambatan dalam keberlangsungan implementasi kebijakan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis teori George C. Edwards III, disposisi sikap pelaksana dalam implementasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pola yang belum sepenuhnya selaras. Secara individu, terdapat sikap positif dan motivasi tinggi, khususnya dari operator yang aktif mengelola aplikasi, namun secara kolektif masih ditemukan resistensi dari sebagian perangkat desa akibat keterbatasan waktu dan anggapan bahwa program belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azima dkk. yang menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan pelaksana dapat memengaruhi efektivitas implementasi, serta penelitian Mustika Rani yang menyoroti bahwa kesiapan dan komitmen SDM menjadi tantangan dalam pengembangan desa digital. Secara keseluruhan, kondisi ini sesuai terhadap teori Edwards bahwa tidak selarasnya disposisi pelaksana mampu berperan sebagai hambatan utama, alhasil dibutuhkan upaya seperti halnya pelatihan dan penguatan komitmen agar implementasi Simpeldesa dapat berjalan lebih optimal.

D. Struktur Birokrasi

Pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi meliputi pembagian kerja, mekanisme koordinasi, perangkat regulasi, serta tingkat keluwesan organisasi yang turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pada konteks Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, hasil wawancara bersama Ibu Isna selaku perangkat desa dan Bapak Irawan selaku operator Simpeldesa memperlihatkan bahwa struktur yang ada telah cukup mendukung, walaupun masih terdapat kekurangan pada aspek regulasi. Pembagian tugas telah tersusun dengan jelas, yang mana Bapak Irawan ditetapkan selaku penanggung jawab utama dan mengatakan “Pembagian tugas dalam pengelolaan Simpeldesa sudah sangat jelas sejak awal implementasi. Saya ditunjuk sebagai pengampu utama oleh Kepala Desa, yang bertanggung jawab penuh atas operasional harian, mulai dari input data, pemeliharaan konten, hingga troubleshooting teknis.” (wawancara, 18 Juli 2025). Kondisi ini meminimalkan kebingungan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja, sejalan atas model Edwards yang menggarisbawahi pentingnya organisasi dalam mencegah terjadinya fragmentasi.

Proses koordinasi antaraktor juga berlangsung efektif, khususnya antara operator dengan Kepala Desa. Bapak Irawan menjabarkan, “Alur koordinasi antara saya sebagai operator Simpeldesa dengan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya berjalan sangat lancar. Setiap minggu, kami mengadakan rapat singkat untuk membahas konten yang perlu diunggah.” Ibu Isna turut mengatakan, “Koordinasi ini memang lancar karena kami semua berada di bawah satu atap Kantor Desa. Saya sebagai perangkat sering membantu Bapak Irawan dengan menyediakan data administratif.” (wawancara, 18 Juli 2025). Pola koordinasi yang bersifat informal ini menguatkan kohesi dalam birokrasi, walaupun dalam pandangan Edwards, keberadaan prosedur formal tetap diperlukan guna menjamin keberlanjutan.

Terkait aspek regulasi, hingga saat ini belum terdapat peraturan desa resmi yang secara khusus mengatur penggunaan Simpeldesa, meskipun pihak pemerintah desa tengah mengupayakan penyusunannya. Ibu Isna menyampaikan, “Sampai sekarang, belum ada regulasi atau aturan desa yang secara resmi mengatur penggunaan aplikasi Simpeldesa. Namun, Pemerintah Desa sedang berusaha menyusunnya; misalnya, kami sudah membahas draf peraturan desa yang mencakup tanggung jawab operator.” (wawancara, 18 Juli 2025). Bapak Irawan juga mengatakan, “Ketiadaan regulasi formal memang membuat kami harus lebih hati-hati, tapi secara praktis, kami sudah punya SOP internal.” (wawancara, 18 Juli 2025). Ketiadaan regulasi formal tersebut menjadi celah dalam struktur yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, sebagaimana telah diperingatkan oleh Edwards.

Secara umum, struktur kerja yang diterapkan di desa menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya transformasi digital. Ibu Isna menjabarkan, “Struktur kerja saat ini sangat mendukung keberhasilan transformasi digital desa melalui Simpeldesa. Dengan tim yang kecil tapi solid, kami bisa bergerak cepat.” (wawancara, 18 Juli 2025). Riset ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas birokrasi di tingkat lokal menjadi kekuatan utama, meskipun keberadaan regulasi formal tetap dibutuhkan guna optimalisasi penerapan Simpeldesa selaras dengan kerangka teori Edwards.

Berlandaskan atas hasil penelitian, struktur birokrasi pada penerapan Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo telah cukup mendukung, ditunjukkan melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi internal yang berjalan baik. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edwards III yang menekankan pentingnya struktur organisasi dalam mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, belum ditemukannya regulasi formal berupa peraturan desa menjadi kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustika Rani yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Simpeldesa juga dipengaruhi oleh penguatan tata kelola dan kelembagaan. Dengan demikian, diperlukan penyusunan regulasi formal agar implementasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi Simpeldesa di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo berlangsung melalui proses komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada perangkat desa dan masyarakat melalui beberapa kegiatan penyuluhan, meskipun frekuensinya terbatas. Penyampaian informasi melalui aplikasi juga masih disertai media konvensional karena tidak seluruh masyarakat memiliki akses dan kemampuan digital yang memadai.

Dari sisi sumber daya, pelaksanaan aplikasi didukung oleh keberadaan perangkat desa, operator, serta sarana prasarana seperti komputer dan jaringan internet. Namun, pengelolaan aplikasi masih terpusat pada satu operator sehingga pelaksanaan belum dilakukan secara merata oleh seluruh perangkat desa. Keterbatasan ini menyebabkan pembaruan informasi bergantung pada waktu dan ketersediaan operator dalam menjalankan tugasnya.

Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup kuat yang tercermin dari upaya tetap menjalankan aplikasi secara konsisten meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan beban kerja. Hal ini terlihat dari aktivitas pembaruan informasi yang dilakukan beberapa kali dalam satu minggu serta tetap dilaksanakannya pengelolaan aplikasi di tengah tugas administratif dan kegiatan lapangan lainnya. Sementara itu, struktur birokrasi menunjukkan adanya pembagian tugas dan koordinasi yang berjalan, meskipun pelaksanaan masih didasarkan pada kesepakatan internal karena belum adanya regulasi formal yang mengatur secara khusus penggunaan aplikasi Simpeldesa.

Dampak kebijakan yang dihasilkan dari riset ini menekankan urgensi penguatan literasi digital pada khalayak, peningkatan kemampuan aparatur desa dengan cara yang terstruktur, dan perumusan regulasi resmi oleh pemerintah desa melalui dukungan dari pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut dibutuhkan supaya pelaksanaan Simpeldesa mampu berlangsung lebih maksimal, berkesinambungan, serta berperan sebagai contoh inovasi e-government di tingkat desa.

REFERENSI

- [1] “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008.”
- [2] “[2] UU Nomor 25 Tahun 2009”.
- [3] B. I. Ketentuan and U. Pasal, “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.”
- [4] R. M. I. R. Rusdy and S. Flambonita, “PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE,” *Lex LATA*, vol. 5, no. 2, Jun. 2023, doi: 10.28946/lexl.v5i2.2351.
- [5] A. S. Auliandini, “JURNAL PRAKTIKSI IDEALIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS APLIKASI SIMPELDESA DALAM SISTEM PELAYANAN DI DESA CIBURUY KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT”, doi: 10.36859/jp.v1i1.2808.
- [6] W. Santia, S. F. Dewi, and H. Muchtar, “Penerapan aplikasi simpeldesa sebagai perwujudan smart village di Nagari,” 2025.
- [7] F. Fitriansyah and C. Nuryakin, “Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 21, no. 2, pp. 220–234, Jul. 2021, doi: 10.21002/jepi.2021.14.
- [8] M. Sunuantari and I. Gunawan, “Diseminasi Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi,” *Journal of Servite*, vol. 2, no. 1, p. 47, Jan. 2021, doi: 10.37535/102002120205.
- [9] George C. Edwards III., *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press (Washington, D.C.), 1980.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Ed. Revisi; Cet. 36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [11] Kartini Syifa, Salbiah Euis, and Apriliani Afmi, “Faktor Pendukung Keberhasilan dan Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Simpeldesa di Desa Cijayanti,” 2024.
- [12] F. Azima, L. Zamzami, and E. Arif, “Komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam mensosialisasikan aplikasi simpeldesa: studi kasus nagari Lubuak Batingkok Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Education and Social Sciences Review*, vol. 5, no. 1, p. 38, Jun. 2024, doi: 10.29210/07essr413300
- [13] B. Mustika Rani, “Building Smart Villages melalui SIMPELDESA: Menuju Dynamic Governance di Sidoarjo Building Smart Villages through SIMPELDESA: Towards Dynamic Governance in Sidoarjo,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, vol. 4, no. 2, pp. 118–128, doi: 10.31289/jiaap.v4i2.6477.
- [14] Y. S. L. Norman K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, 22nd, reprint ed. Michigan: SAGE Publications, 1994.
- [15] A. M. H. Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Illustrated, Reprint. SAGE, 1994, 1994.

- [16] H. Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB," 2010.
- [17] P. Amelia Simbolon et al., "Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Raya Palka Sindangsari," *Journal on Education*, vol. 06, no. 04, 2024.
- [18] A. S. Y. Yasin, A. Anwar, A. Adityanto, and D. Daryono, "Kebijakan Pengembangan Sdm Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur," *JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)*, vol. 4, pp. 108–119, Oct. 2024.
- [19] I. Antika Putri et al., "PT. Media Akademik Publisher IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA," *JMA*, vol. 2, no. 11, pp. 3031–5220, 2024, doi: 10.62281.
- [20] Astuti, M. Wahyuddin Abdullah, R. Dwi Ayu Parmitasari, and Bukhari, "PENGARUH SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA TAMMERODO," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, vol. 15, pp. 125–136, Dec. 2024.
- [21] T. O. Pradana and A. Lutfi, "Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Penilaian SAKIP dan SPIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publi*, vol. 11, pp. 153–163, Aug. 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.